

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

5.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. DINAS PENDIDIKAN

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak
- g. Program Pendidikan Dasar (Wajib Belajar 9 Tahun)
- h. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- i. Program Non Formal

2. DINAS KESEHATAN

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- g. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
- h. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- i. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- j. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
- k. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- l. Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat



3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- g. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- h. Program Pembangunan Drainase dan Gorong-Gorong Jalan
- i. Program Pengendalian Banjir
- j. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya
- k. Program Sarana Infrastruktur Sumber Daya Air dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- l. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perdesaan
- m. Program Peningkatan Kualitas dan Penataan Kawasan Daerah sesuai Rencana Tata Ruang
- n. Program Peningkatan Infrastruktur Bangunan Gedung dan Prasarana Pemerintahan
- o. Program Peningkatan Kualitas Sistem Informasi dan Pelayanan Jasa Konstruksi serta Verifikasi Perijinan

4. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Pengembangan Kinerja Air Limbah
- g. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman
- h. Program Pengembangan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman
- i. Program sertifikasi perumahan dan permukiman
- j. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan
- k. Program Peningkatan Prasarana Penerangan Jalan Umum
- l. Program Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum
- m. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau



5. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- g. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- h. Program Pengembangan Perencanaan Pembangunan
- i. Program Perencanaan Ekonomi
- j. Program perencanaan pembangunan infrastruktur dan SDA
- k. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan
- l. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- m. Program Penelitian dan pengembangan Daerah
- n. Program Perencanaan Sosial Budaya
Urusan Statistik
- o. Program Pengembangan data dan Informasi

6. DINAS PERHUBUNGAN

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- g. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- h. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- i. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- j. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
- k. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

7. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan e-government
- g. Program Pengembangan Data, Informasi Statistik Sektoral
- h. Program Persandian dan Pengamanan Informasi

8. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- g. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- h. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- i. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

9. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
- f. Program Penataan Administrasi Kependudukan

10. DINAS SOSIAL

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Pemberdayaan Sosial
- g. Program Penanganan Fakir Miskin
- h. Program Rehabilitasi Sosial
- i. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

11. DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- g. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

12. DINAS TENAGA KERJA

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
- g. Program Peningkatan kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja
- h. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- i. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

13. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

- f. Program Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro
- g. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro
- h. Program Peningkatan Daya Saing Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro

Urusan Perindustrian

- i. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Urusan Perdagangan

- j. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
- k. Program Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan



14. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Urusan Kebudayaan

- f. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- g. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Urusan Pariwisata

- h. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- i. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- j. Program pengembangan usaha dan industri pariwisata
- k. Program Pengembangan Kemitraan

15. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Peningkatan peran serta Kepemudaan
- g. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
- h. Program peningkatan sarana dan prasarana Olahraga

16. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- f. Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama
- g. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- h. Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik

17. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur



- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- f. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Pengembangan Kapasitas Pol PP
- g. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- h. Program Pembinaan Potensi Ketahanan dan Perlindungan masyarakat

18. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- f. Program Penanggulangan Bencana
- g. Program Mitigasi Bencana

19. SEKRETARIAT DAERAH

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- g. Program Pengelolaan Administrasi Wilayah Perbatasan
- h. Program Penataan, Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
- i. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
- j. Program Penataan dan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Daerah Bawahan
- k. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- l. Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
- m. Program Pembinaan BUMD
- n. Program Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah
- o. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- p. Program Pemenuhan Kebutuhan Sarana Peribadatan
- q. Program Pembinaan Kesejahteraan Rakyat



r. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dan keprotokolan

Urusan Pertanahan

s. Program Penataan. Penguasaan. Pemilikan. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

t. Program Pembinaan Pertanahan

20. SEKRETARIAT DPRD

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

f. Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

g. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

21. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah

g. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

h. Program Manajemen Aset Daerah

22. BADAN PENDAPATAN DAERAH

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

f. Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah

23. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Pendidikan Kedinasan
- g. Program Peningkatan Administrasi dan Mutasi Kepegawaian Daerah

24. INSPEKTORAT DAERAH

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Pembangunan Daerah
- g. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
- h. Program Pengawasan dan Pengendalian Internal dan Eksternal

25. KECAMATAN

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
- g. Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
- h. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan

26. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Urusan Pangan
- f. Program Peningkatan Ketahanan pangan
- Urusan Pertanian
- g. Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
- h. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Pangan



- i. Program Peningkatan Produksi. Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan
- j. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
- k. Program Pemenuhan keamanan pangan Asal ternak dan Agribisnis peternakan rakyat
- l. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan

27. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- e. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- f. Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
- g. Program Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- h. Program Perlindungan Anak

28. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- e. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan
- f. Pengembangan Lembaga ekonomi desa
- g. Program peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
- h. Program pembinaan dan fasilitasi Keuangan desa

29. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
- g. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
- h. Program Penyelenggaraan Kearsipan Daerah
- i. Program Pengembangan Perpustakaan
- j. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan



30. DINAS PERIKANAN

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program pengembangan budidaya perikanan
- g. Program pencegahan dan penanggulangan hama penyakit ikan
- h. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- i. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan kegiatan maka berikut ini rekapitulasi belanja langsung pada tahun 2019

Tabel 5.1
Rekapitulasi Belanja Langsung Tahun 2019

NOMOR	URUSAN PEMERINTAH DAERAH / OPD	INDIKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	Rp 105.912.625.308,63
2	Dinas Kesehatan	Rp 118.492.814.305
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 142.782.115.000
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Rp 120.296.675.750
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 2.587.681.857
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 4.707.204.300
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 2.814.385.000
8	Dinas Sosial	Rp 9.408.129.500
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp 6.487.689.574
10	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 3.392.405.240
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 5.295.992.540
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp 4.212.337.572
13	Dinas Perhubungan	Rp 10.032.248.840
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Rp 4.931.416.000
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Rp 5.184.568.490
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Rp 6.002.129.800
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Rp 2.729.782.400
18	Dinas Perikanan	Rp 12.217.443.570
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp 14.947.944.000
20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp 7.469.753.850
21	Dinas Tenaga Kerja	Rp 3.387.222.420
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp 14.837.271.499
23	Sekretariat DPRD	Rp 21.138.577.056
24	Sekretariat Daerah	Rp 64.588.175.850



NOMOR	URUSAN PEMERINTAH DAERAH / OPD	INDIKASI ANGGARAN (Rp)	
25	Kecamatan Bintan Timur	Rp	10.807.248.400
26	Kecamatan Gunung Kijang	Rp	6.435.396.700
27	Kecamatan Teluk Bintan	Rp	3.742.401.000
28	Kecamatan Bintan Utara	Rp	9.150.229.200
29	Kecamatan Teluk Sebong	Rp	4.079.398.000
30	Kecamatan Tambelan	Rp	3.712.474.000
31	Kecamatan Seri Kuala Lobam	Rp	5.627.342.441
32	Kecamatan Toapaya	Rp	5.745.816.000
33	Kecamatan Bintan Pesisir	Rp	1.741.199.000
34	Kecamatan Mantang	Rp	2.085.236.400
35	Inspektorat Daerah	Rp	3.839.361.000
36	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	13.511.194.000
37	Badan Keuangan dan Aset daerah	Rp	26.554.323.360
38	Badan Pendapatan Daerah	Rp	6.565.399.000
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	7.020.013.279
Jumlah Total		Rp	804.473.621.502

Selanjutnya, rincian rencana program, kegiatan, sasaran, serta anggaran belanja langsung tahun 2019 berdasarkan urusan kewenangan dan organisasi perangkat daerah sebagaimana terlampir.